

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk dalam Negara Berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap negara memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo 2018, pajak memiliki unsur-unsur diantaranya adalah pajak yang dipungut negara berupa iuran dari rakyat berwujud uang bukan barang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, pemerintah tidak menunjukkan adanya kontraprestasi dalam hal pembayaran pajak, serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sejatinya, pajak nasional ditinjau dari pengenaannya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni Pajak Negara dan pajak daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Sumber keuangan negara berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut. yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana.

Kemajuan dan perkembangan kebutuhan informasi yang cepat terutama teknologi di era globalisasi, hal tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi didalam suatu organisasi (Zulaila, 2020). Sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan perusahaan melalui kecepatan, fleksibilitas, integritas, dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Teknologi informasi dipandang sebagai alat pengolah data yang menjadi tanggung jawab departemen pengolah data. Secara prinsip teknologi informasi telah menjadi kemudahan bagi organisasi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan oleh karena itu teknologi informasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi organisasi. Didalam pengetahuan pengguna sistem informasi dalam mengoperasikan sistem informasi yang baru sangat dibutuhkan pegawai yang pandai dan mengerti agar dapat beroperasi secara maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya, dan dapat dilihat dari bagaimana pengguna sistem menjalankan sistem informasi akuntansi yang ada.

Menurut Napitupulu (2015), Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan hal ini telah membawa pada pengembangan fenomena baru yang disebut dengan *e-government*. Saat ini dunia sedang menuju era masyarakat informasi dimana kebutuhan dan tuntutan akan informasi menjadi sangat tinggi untuk diakses, dikelola dan didayagunakan dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparansi bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan TIK. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*.

Konsep *e-government* hadir dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah di dunia. Konsep *e-government* berkaitan erat dengan perkembangan TIK didunia. Salah satu bentuk perwujudan *e-government* ialah terselenggaranya *smart city*. Salah satu rancangan dari *smart city* adalah *smart government* sebagai pusat dari pelaksanaan *smart city*. Terdapat 6 dimensi dalam mengukur *smart city*, yaitu *smart enviroment*, *smart mobilty*, *smart government*, *smart economy*, *smart people*, dan *smart living* (Annisa, dkk. 2018).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis adalah instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk menjalankan tanggung jawab dalam penerimaan pajak daerah, Bapenda membutuhkan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem *online* pajak daerah dengan tujuan adanya transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke kas daerah, transparansi data transaksi usaha wajib pajak kepada Pemerintah Daerah, dan percepatan penyampaian data dan informasi pajak.

Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis membuat beberapa strategi

dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah pembayaran dan penerimaan Pajak Daerah melalui Sistem *Online* Pajak Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah, bahwa dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional perlu ditingkatkan dan menggunakan Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*. Dengan adanya perwujudan dari *e-government* sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi, Bapenda Kabupaten Bengkalis memakai sistem *online* dengan menerapkan aplikasi *Smart Government (SmartGov)*.

Aplikasi *SmartGov* di Bapenda Bengkalis telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2019 bekerjasama dengan PT. Cartenz *Technolgy* Indonesia, untuk melayani seluruh jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis. Aplikasi ini digunakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya serta pelaksanaannya, dengan melaksanakan sistem *online* pajak daerah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. *SmartGov* adalah perbaikan layanan dengan mengedepankan penggunaan teknologi. Selain itu manfaat yang menguntungkan dari penggunaan aplikasi *SmartGov* ini adalah adanya transparan pembayaran dan penyeteroran pajak ke kas daerah, transparan data transaksi usaha wajib pajak, transparansi pelaporan pajak oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah, dan percepatan penyampaian data dan informasi pajak. Adanya *SmartGov* dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas penerimaan Pajak Daerah kedalam suatu aplikasi sehingga bisa lebih seragam, sederhana, cepat dan juga diharapkan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan pelayanan menjadi lebih baik. Untuk menunjukkan kualitas pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan, penggunaan aplikasi *SmartGov* yang direncanakan secara rinci dan menggunakan strategi yang baik

melalui proses kegiatan yang dimulai dari proses pendataan, pelayanan, pembayaran, monitoring, dan laporan akan mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Daerah yang akan diterima nantinya.

Permasalahan yang mendasar dalam penggunaan *SmartGov* di Bapenda Kabupaten Bengkalis adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan *SmartGov*. SDM di Bapenda Kabupaten Bengkalis masih banyak yang belum memahami atau menguasai cara penggunaan *SmartGov*, sering terjadinya salah penginputan data untuk wajib pajak, hal ini bisa menyebabkan lambatnya proses dalam penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis. Dengan permasalahan ini, perlu adanya pelatihan untuk SDM di Bapenda dalam menerapkan *SmartGov*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penggunaan *SmartGov* Dalam Pembayaran Pajak Daerah Sebagai Sarana Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak daerah melalui aplikasi *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah adanya penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana kontribusi penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis?
4. Apa saja kendala dalam penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini di fokuskan pada mekanisme penggunaan *SmartGov*, perbandingan sebelum dan sesudah adanya penggunaan *SmartGov*, dan bagaimana kontribusi dalam penggunaan *SmartGov* Sebagai Sarana Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis, dan apa saja kendala dalam penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak daerah melalui aplikasi *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah adanya penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis
3. Untuk kontribusi penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis
4. Untuk kendala dalam penggunaa *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Bengkalis

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui Penggunaan *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bengkalis.

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian

selanjutnya terkait penggunaan aplikasi *SmartGov* sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak daerah.

3. Bagi Instansai

Hasil penelitian ini diharapkan pentingnya penggunaan aplikasi *SmartGov* dalam proses peningkatan penerimaan pajak daerah

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab soini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknuik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peniliti.